



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S1) Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos)

Oleh:

SRI AYANI

NIM. 11840124118

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Sri Ayani

Nim : 11840124118

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa
Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi



Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di _____
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudari **Sri Ayani, NIM. 11840124118** dengan judul "**Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna Islam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln H.R Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PC Box 1004
Telp (0761) 562051, Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri" yang ditulis oleh :

Nama : Sri Ayani
Nim : 11840124118
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

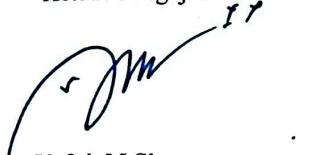
Hari / tanggal : Kamis, 17 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I


Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Sekretaris / Penguji II


Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III


Muhammad Soim, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV


M. Imam Arifandy, S.KPm., M.Si
NIP. 1993051 202012 1 016



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sri Ayani
Nim	: 11840124118
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Sawah, 28 September 1999
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Sri Ayani
NIM. 11840124118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI**

Nama : SRI AYANI

Nim : 11840124118

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teori pembangunan desa menurut Raharjo sebagai landasan, yang dioperasionalkan dalam konteks swakelola pembangunan infrastruktur. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, termasuk satu informan kunci yaitu sekretaris Desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan hanya sebagian dari dana alokasi dasar. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang berhasil direalisasikan meliputi jalan desa, jalan usaha tani, sumur bor, box culvert, jembatan, dan pasar desa. Namun demikian, proses pembangunan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, dan tingkat ekonomi warga yang relatif rendah. Faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur, Dana Desa, Swakelola

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal realization of infrastructure development and public facilities in Padang Sawah Village, Kampar Kiri Subdistrict. The aim of this study is to analyze the role of the village government in infrastructure development and to identify the inhibiting factors. This study employs a qualitative descriptive approach, using Raharjo's theory of village development, which is operationalized through a self-management (swakelola) model of infrastructure development. The research involved 5 informants, including one key informant, the village head. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and then analyzed qualitatively. The findings show that not all village funds are allocated for infrastructure development; only a portion of the basic allocation is used. The development process includes several stages: planning, implementation, evaluation, and accountability. Over the past five years, infrastructure projects that have been successfully implemented include village roads, agricultural access roads, bore wells, box culverts, bridges, and a market. Nevertheless, the development process faces several obstacles, such as limited funding, a lack of human resources, low community participation, and relatively poor economic conditions. These factors hinder equitable and sustainable village development.

Keywords: *Role of Village Government, Infrastructure Development, Village Funds, Self-Management (Swakelola)*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan memanjangkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya, serta shalawat dan salam penulis limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pertama penulis berterimakasih kepada kedua orang tua teristimewa dan tercinta Ayahanda Andes dan Ibu Wartini atas limpahan do'a dan keringat dalam mencari nafkah untuk mendukung anaknya meraih cita-cita serta dorongan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih setulus-tulusnya kepada

- 1 Prof. Dr Hj Leny Nofianti MS, S.E., M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau.
- 2 Dr. Masduki., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau..
- 3 Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
- 4 Dr. Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Sekaligus Sebagai Pembimbing Akademik Penulis.
- 5 Pembimbing Skripsi Bapak Muhammad Soim, S.Sos., M.A telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi akhir penulis
- 6 Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Pihak Desa pihak desa Padang Sawah yang telah memberikan izin untuk penulis melaksanakan penelitian.

Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis saudara kandung Andri Prayoga, Rosa Iswri

9. Teman sekaligus sahabat penulis Mella

10. Seluruh teman-teman PMI Angkatan 2018 khususnya lokal B

11. Serta seluruh elemen yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14 Juli 2024

Penulis

Sri Ayani

Nim : 11840124118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTAK BAHASA INDONESIA	i
ABSTRACT BAHASA INGGRIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Penegasan Istilah	4
1.3.Rumusan Masalah	5
1.4.Tujuan Penelitian	5
1.5.Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teori	9
2.3 Definisi Konsep.....	22
2.4 Konsep Operasional	22
2.5 Kerangka Pikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Subjek Penelitian.....	26
3.4 Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.7 Validitas Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Letak Geografis Desa Padang Sawah.....	31
4.2. Kondisi Demografi Penduduk Desa Padang Sawah	31
4.3. Topologi Desa Padang Sawah.....	32
4.4. Pendidikan Penduduk Padang Sawah	32
4.5. Mata Pencaharian Penduduk Padang Sawah.....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	36
5.2. Pembahasan.....	49

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	56
6.2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA **58****LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa	2
Tabel 1.2 Pembangunan Infrastruktur Desa Padang Sawah.....	3
Tabel 2.1 Konsep Operasional	23
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	32
Tabel 4.2 Tipologi Desa	32
Tabel 4.3 Pendidikan Penduduk	33
Tabel 4.4 Sarana prasarana Pendidikan	34
Tabel 4.5 Mata Pencarian Penduduk	34



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

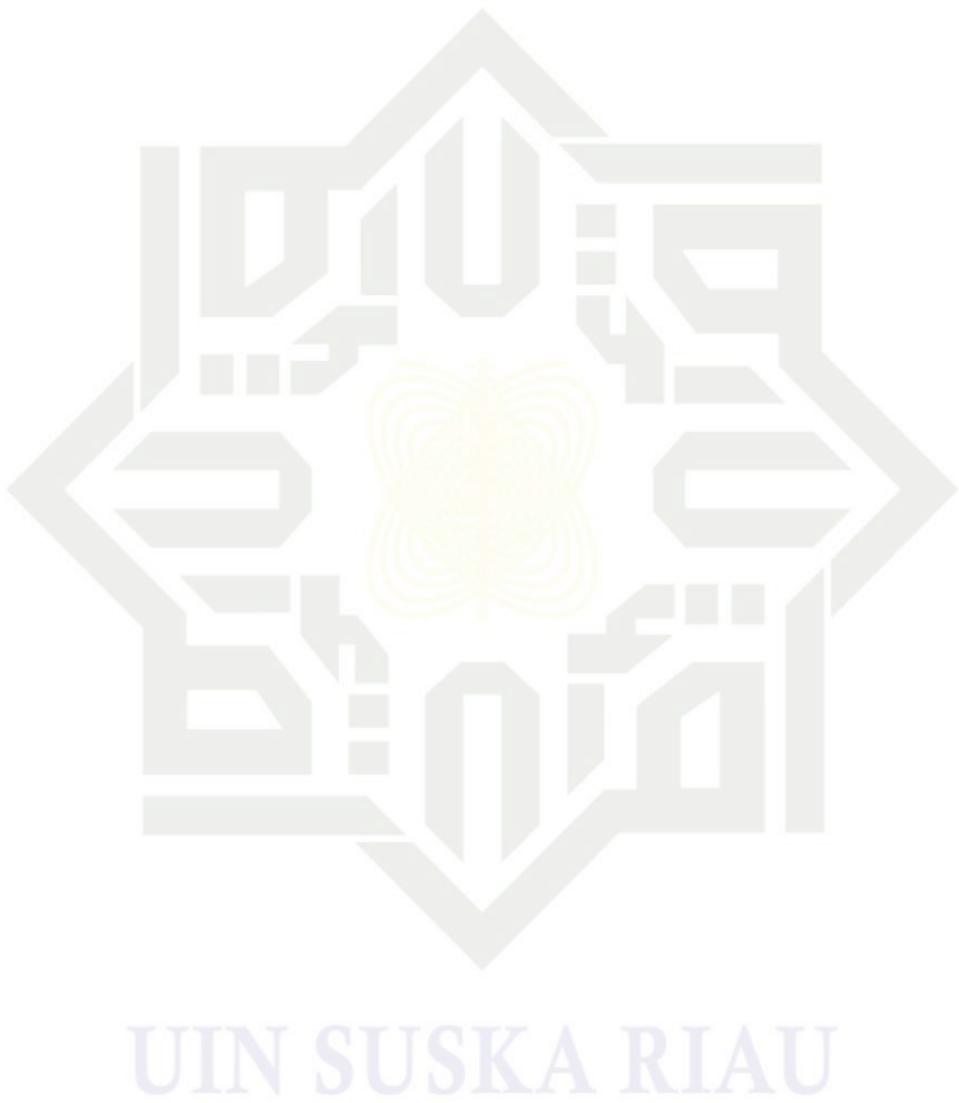
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	24
---------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan seagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹ Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.²

Pemerintah pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran departemen pekerjaan umum. Untuk pemerintah daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk

¹ Evy Sriwati, Budi Setiawati, Dan Nurbiah Tahir, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur,” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap) 5, No. 1 (2024): 104–116.

² Adam Latif, dkk, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani,” Journal Ilmiah Administrative. 8, No. 1 (2020): 104–116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Hasyim Riau

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa³

Berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara , serta peraturan menteri desa dan peraturan menteri keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai peganggaran, penyaluran, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban pelaporan dana desa, tahun 2025, total pagu dana desa sebesar 234.331.167 yang disalurkan kepada 242 desa di Kabupaten Kampar. Salah satu desa yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat adalah desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri dengan jumlah dana desa per 2025 adalah 790.238 juta⁴

Masalah pembangunan infrastruktur sering terjadi di indoneisa, secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan. Diberbagai pelosok tanah air masih diperoleh berbagai daerah pedesaan yang sangat senjang keadaannya dibandingkan dengan kota yang lengkap dengan sumber dayanya, salah satunya Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri.

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada desa-desa seluruh Indonesia adalah 1 miliar/ satu desa sesuai dengan program presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo yang kemudian dituliskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 yang berlaku mulai November 2024 s.d 31 Desember 2025 Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Anggaran Dana Desa

Jenis Program	Besaran
Percepatan Pembangunan Desa	40%
Penekanan Kemiskinan	20%
Ketahanan Pangan	8%
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dll	32%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran dana desa dibagi menjadi 4 fokus penting. Diantaranya percepatan pembangunan desa sebesar 40%, Penekanan kemiskinan 20%, ketahanan pangan 8%, pemberdayaan ekonomi

³ Dewi Sarah Simbolon, Julia Sari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," Jurnal Kewarganegaraan 5, No. 2 (2021): 104–116.

⁴ www.djpk.kemenkeu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat dan lainnya 32 %. Dalam hal ini penulis mengambil titik fokus pada pembangunan desa yang memiliki persentase penggunaan dana desa paling besar. Fokus penelitian ini adalah dalam pembangunan infrastruktur desa. Sebagaimana dijelaskan bahwa infrastruktur juga menjalankan peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat gerak dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi dan energi. Oleh, karena itu pembangunan sektor ini menjadi pondasi pembangunan selanjutnya.

Pada dasarnya, suatu daerah jika mempunyai infrastruktur yang bagus, bisa dikatakan dearah tersebut memiliki tingkat ekonomi yang bagus. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang kurang bagus, keadaan ekonominya pun cenderung kurang bagus. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, termasuk di mulai dari pembangunan infrastruktur tingkat desa. Sebab sebuah misi teguh yang di yakini pemerintah adalah membangun Indonesia dari desa serta pembangunan desa untuk Indonesia salah satu di wujudkan dengan pembangunan infrastruktur yang baik.⁵ Pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Desa Padang Sawah dapat dilihat seperti tabel berikut

Tabel 1.2
Pembangunan Insfrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan
Kampar Kiri Tahun Anggaran 2022-2025

Jenis Pembangunan	Jumlah	Biaya	Tahun
Pembuatan Jalan desa	3.400 meter	112.000.000	2022-2025
Peningkatan Badan Jalan	5.500 meter	100.000.000	2022-2024
Jembatan	2 unit	33.000.000	2023-2024
Bux Lover	1 Unit	2.300.000	2024
Pembuatan Jalan Usaha Tani	1000 meter	40.000.000	2012-2025
Sirtu	600 Meter	19,000,000	2023-2025
Renovasi Pasar Desa	1 Unit	150.000.000	2013-2025

Sumber: Pra Riset Kantor Desa Padang Sawah. 2025

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa, ada beberapa jenis infrastruktur yang sudah dibangun di desa Padang Sawah , dengan biaya total sekitar adapun pembangunan tersebut diantaranya jalan desa, peningkatan badan jalan,jembatan,

⁵ Awal Nopriyanto Bahasoan Et Al., “Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Literature Review,” *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 8, No. 1 (2024): 43-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bux lover, pembuatan jalan usaha tani, sirtu dan pasar desa. Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa pembangunan insfrastruktur desa sudah dilakukan namun untuk *quantity* (jumlah) masih jauh dari yang harapkan padahal desa memiliki cukup dana untuk melakukan pembangunan desa

Sehingga berdasarkan observasi sementara penulis melihat adanya fenomena pembangunan infrastruktur di desa Padang Sawah perlu dikembangkan lebih baik. hal itu dilihat dari jalan-jalan menuju perkebunan warga masih jalan tanah dan sulit di lalui pada musim hujan karna kondisi berlumpur hal ini harusnya menjadi fokus pemerintah karena salah satu akses mata pencarian mayoritas penduduk. Selain itu, tahapan pedoman pembangunan desa dengan swakelolah desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemantauan dan pengawasan masih kurang efektif. Terjadinya miskomunikasi antara pihak yang berkempentingan yang ada di wilayah desa serta timbulnya sikap acuh tak acuh masyarakat desa mengenai pembangunan desa juga merupakan salah satu masalah yang belum terkendali.

Berdasarkan deskripsi di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini ke dalam sebuah judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri”**

1.2 Penegasan Istilah

1. Peran Pemerintah Desa

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Pemerintah Desa. Maka peran pemerintah desa adalah suatu sikap dari aparatur desa dalam pembangunan insfrastruktur desa yang dimana peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Desa,

2. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁶ Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset

⁶ P Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Bumi Aksara: Jakarta, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dari tradisional menuju modern. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

3. Swakelolah Desa

Pelaksanaan Swakelola Desa". Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swakelola oleh desa. Fokusnya adalah pada bagaimana desa mengelola sumber daya mereka sendiri untuk mencapai tujuan pembangunan desa, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dan penggunaan potensi lokal.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan insfrastruktur di desa Padang Sawah kecamatan Kampar Kiri

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latarbelakang diatas terdapat beberapa tujuan penelitian ini Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan insfrastruktur di desa Padang Sawah kecamatan Kampar Kiri

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian tentang landasan teori, referensi konsep, konsep operasional, kerangka berpikir, serta kajian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, Populasi dan Sampel, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta Validitasdata.



UIN SUSKA RIAU

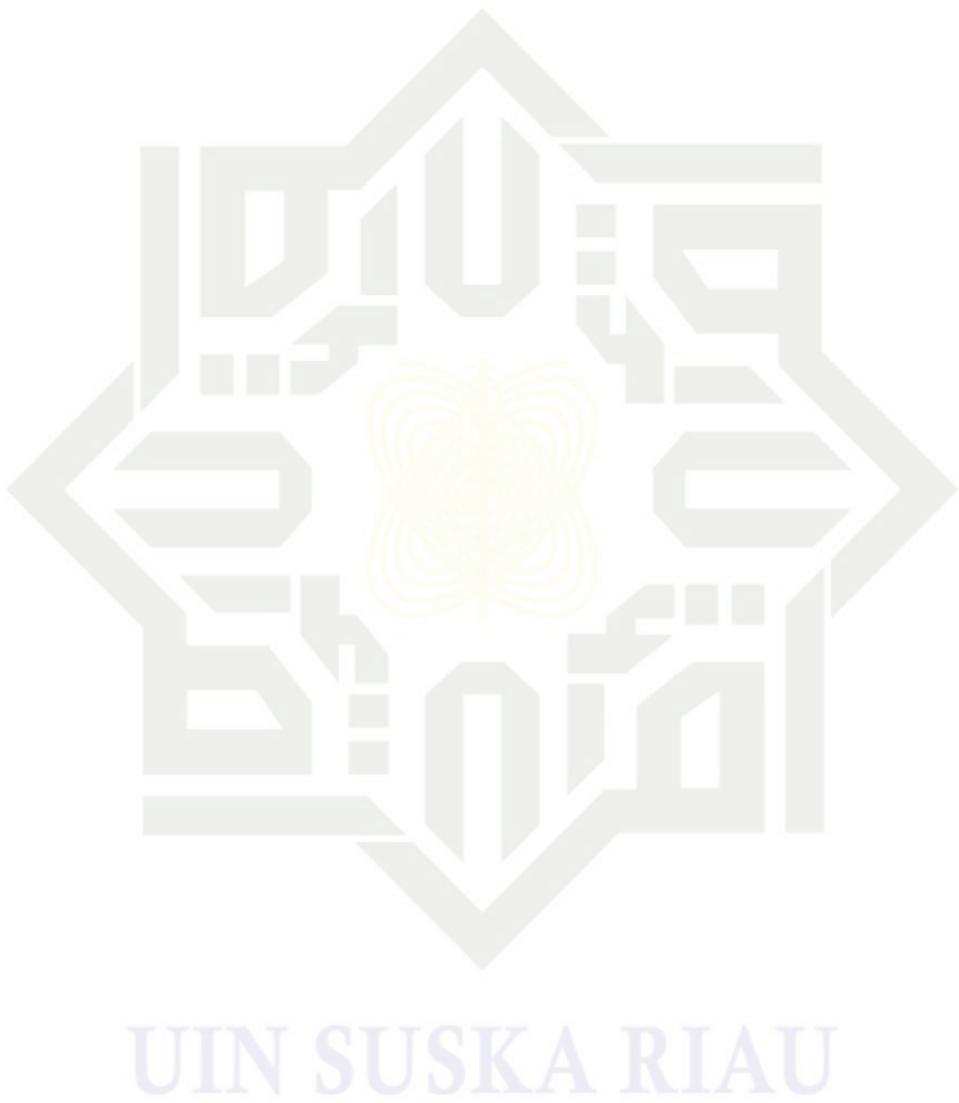
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

2.1. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis , maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sarah Simbolon, 2021, dengan judul *peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur*. Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indicator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena apparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajab, 2023 dengan judul *Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur*, Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak yang telah dipilih masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kawasan perdesaan menggunakan pendekatan triangulasi dengan mengambil studi kasus di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara secara terstruktur dengan pedoman wawancara dengan informan. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, sedangkan pengolahan data penelitian menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian pembagunan infrastruktur di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan dan

⁷ Dewi Sarah Simbolon Et Al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," Jurnal Kewarganegaraan 5, No. 2 (2021): 295–302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan dapat membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembagunan infrastruktur Desa Tasokko lebih mengoptimalkan alokasi dana desa sebagai anggaran yang baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indrasto Wahyudi Dahlan, 2021, dengan judul *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah menfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transparansi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Richard C Alokendek, 2017, Peran pemerintah desa dalam penggunaan dana pembangunan insfrastruktur di desa Darunu kecamatan wori. pada penelitian ini, peneliti meneliti masalah pembangunan infrastruktur di Desa. Dalam penelitian disana Masyarakat Desa mengeluhkan air bersih yang terjadi di tahun 2015 â€“

⁸ Abdul Rajab Dan Muh Marwan Malik, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Insfrastruktur," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen* 19, No. 3 (2023): 689–701.

⁹ Indrasto Wahyudi Dahlan, Anwar Parawangi, Dan Amir Muhiddin, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2016 di tahun 2015 lalu terjadi kekeringan di desa Darunu akibat panas ekstrem yang melanda seluruh Indonesia. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk membuat program pembangunan desa yaitu pembuatan sumur bor dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan air bersih di tahun 2015 lalu. Meskipun telah terealisasi tetapi bermasalah kondisi airnya sehingga di tahun 2016 Pemerintah Desa Darunu Membuat Program Pemerintah Desa Tahun 2016 yaitu perbaikan sumur bor. Dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif di buku Sugiyono tahun 2015. Dalam bukunya mengatakan kalau metode penelitian kualitatif terfokus pada obyek yang di teliti. Fokusnya kearah pemerintah dan masyarakat desa Darunu, dengan menggunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data di lapangan. Salah satu jenis wawancara dalam buku Sugiyono yang peneliti menggunakan di lapangan yaitu wawancara terstruktur. Hasilnya di lapangan dengan berbagai pertanyaan wawancara mereka mengatakan bahwa di desa tersebut mengalami masalah air bersih di tahun 2015 akibat cuaca panas ekstrem tersebut, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha mencari air bersih dari desa tetangga. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa di masukan kedalam dokumen RPJMDes mereka tahun 2015, dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp. 125.960.400, jumlah dana tersebut untuk membeli material, alat, pengeboran air yang berjumlah 3 unit, serta upah pekerja. Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalah masalahnya meskipun sudah siap di pakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi.¹⁰

Berbeda dengan penelitian diatas maka penulis lebih mau meneliti terkait peran pemerintah desa dalam pembangunan insfrastruktur desa di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri dan mengetahui jenis insfrastruktur yang sudah dibangun di desa Padang Sawah Tahun Anggaran 2022-2025

2.2. Landasan Teori

1. Konsep Peran Pemerintah Desa

a. Pengertian Peran Pemerintah Desa

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan

¹⁰ Richard C Alokendek, Marthen Luther Kimbal, Dan Gustaf Undap, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori," Jurnal Eksekutif 1, No. 1 (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹¹ Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:¹²

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Istilah pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh/melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah.¹³ Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.¹⁴ Apabila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi. undang-undangan yang tertinggi.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.¹⁵

¹¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2002).

¹² Ibid.

¹³ Sutoro Eko Yunanto, “Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan,” *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 2, No. 1 (2021): 1–20.

¹⁴ Fika Fauzia, Adinda Virantika, Dan Gerry Firmansyah, “Langkah Langkah Strategis Pemenuhan Kebutuhan Sdm Talenta Digital Di Lingkungan Pemerintahan Indonesia,” *Konferensi Nasional Ilmu Komputer (Konik)* (2021): 39–46.

¹⁵ Virginia V Rumawas, Herman Nayoan, Dan Neni Kumayas, “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan),” *Governance* 1, No. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusanataukebijakan mengenai regulasi.¹⁶

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.

Fungsi pemerintahyangitumengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perluadanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peranpemerintah yang dimaksud antara lain :¹⁷

b. Landasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut:¹⁸

- 1) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- 3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

¹⁶ Bob Sanma Parsaulian Simbolon, “Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir).” (2022).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Rusnan Rusnan, Sarkawi Sarkawi, Dan Johannes Johny Koynja, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Diskresi* 2, No. 2 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Bandan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai embaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- 5) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa
- 6) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. 7. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.¹⁹

c. Peran Pemerintah Desa

maka peranpemerintah yang dimaksud antara lain :²⁰

- 1) Pemerintah sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunandaerah. Sebagai fasiitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, sertadi bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.
- 2) Pemerintah sebagai regulator Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitanperaturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuandasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segalakegiatan pelaksanaan pembangunan

Dalam pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantuolehPerangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasionaldalam mengambil keputusan ditengah ttengahmasyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunandan

¹⁹ Muhammad Nurman, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keaktifan Kader Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga Di Desa Tanjung Medang Wilayah Kerja Puskesmas Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2017," Jurnal 1, No. 1 (2017): 2194–2580.

²⁰ Simbolon, "Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.²¹

Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa. Sedangkan menurut pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut : Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Penjelasan undang undang tersebut dapat sebagai pedoman khususnya bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya pada saat penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Konsep Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.²² Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan adalah perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, pembangunan tingkat kesejahteraan ditentukan

²¹ Viethzal Rivai, Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003).

²² Siagian, *Administrasi Pembangunan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh dimensi ekonomi, sosial, politik atau hukum.²³ Mahayanti fitriandari dan winata mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan saat ini dalam rangka perbaikan atas kondisi masa kini , lampau dan masa yang belum sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia. Proses pembangunan itu dilakukan dalam rangka supaya pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.²⁴

Johan Galtung: Upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Selanjutnya Nugroho dan Rochmin Dahuri: Upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Ginanjar Kartasasmita: Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana

Menurut effendi, pembangunan diartikan sebagai suatu upaya peningkatan segenap sumberdaya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam pengertian ini makna pembangunan lebih berorientasi kepada pembangunan masyarakat. Pendapat ini didukung oleh teori Rogers dalam suyono yang mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material termasuk didalamnya bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai.²⁵

Hal senada disampaikan oleh Tjokrominoto yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya sebagai berikut : (1) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (2) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. (3) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*). (4) pembagunan

²³ Ismail Nawawi Dan Aditya Abdurrahman, *Pembangunan Dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori Dari Aspek Ekonomi, Dan Sosiologi* (Putra Media Nusantara (Pmn), 2009).

²⁴ Malhayanti, Fitriani, Dan Winalti, *Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Pustaka Media Utama., 2021).

²⁵ Rochajat, *Komunikasi Pembangunan Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers., 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh sifat dan konsep transcendental, sebagai meta-disciplinary phenomenon bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. (6) pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, dan time specific*. (Suryono, 2010)

b. Pengertian Pembangunan Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi konvensional yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkaan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.²⁶ Pembangunan adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada; pertama, pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal dan sebaik mungkin. Kedua, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.²⁷

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâhid syarâ'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *fâlâh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa *fâlâh* meliputi kelangsungan hidup,

²⁶ Retnawati Siregar Dan M Shabri Abd Majid, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Emt Kita* 7, No. 1 (2023): 71–82.

²⁷ Rifyal Zuhdi Gultom Dan Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2020): 203–211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar.

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofis, yaitu tauheed uluhiyyah, tauheed rububiyyah, khilafah, tazkiyyah an-nas, dan al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama Islam, yakni Alquran dan sunnah. Menurut paradigma Islam, kelima pondasi filosofis ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan. Sesuai dengan Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَلَا وَمِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ الْنُّشُورُ ١٥

Artinya” *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (QS. Al-Mulk 15)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menjelajahi bumi dan penjurunya dalam artian Allah memberikan kepada manusia hak untuk membangun bumi dan isinya dan juga memberikan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan bumi tersebut. Dari pembangunan bumi Allah, manusia bisa mencari rezeki didalamnya.

c. Pengertian pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.²⁸ Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup masyarakat.

²⁸ Adisasmita Raharjo, “Pembangunan Pedesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi Konsep Desa Pusat Pertumbuhan,” Yogyakarta: Graha Ilmu (2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa juga diartikan sebagai upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Didalam pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

- 1) Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objekutamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- 2) Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.²⁹

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan indonesia. Dengan adanya dana desa ini maka potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal. Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sering kali pemerintah desa maupun pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa menjadi jebakan yang berujung pada perbuatan melawan hukum atau pelanggaran mal adminitrasi. Sering dengan regulasi yang meningkat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa yang pada intinya pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, bukan berarti pemerintah desa dengan sumberdaya melaksanakan secara mandiri dalam pelaksanaan kegiatan. Tetapi swakelola yang dimaksud adalah pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan desa yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa.

²⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dasar Hukum Pembangunan Desa

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Adapun dasar hukum pembangunan desa UU No 6 2014 bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa.

e. Pembangunan Partisipatif

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Santoso Sastropoetro (1988) sebagai berikut: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan."³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

- 1) Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- 2) tersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.

³⁰ A Santoso Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Get Press Indonesia, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S. Hamidjoyo bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
- 2) Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.
- 3) Partisipasi berarti terwujudnya kreativitas dan aktifitas.

f. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujuhkan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut sondang Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.³¹

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup:³²

- 1) Prasarana dan sarana perhubungan : jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyebrangan sungai dan danau.
- 2) Prasarana dan sarana perairan : bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air
- 3) Prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan : bangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase
- 4) Bangunan dan jaringan utilitas umum : gas, listrik dan telekomunikasi.

³¹ Siagian, *Administrasi Pembangunan*.

³² Achmad Wirabrata Dan T Ade Surya, "Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2011): 729–752.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.³³

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benarbenar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa

3. Konsep Swakelola Desa

a. Pengertian Swakelolah Desa

Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh lembaga/satuan perangkat daerah /institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat tertentu. Swakelola juga diartikan sebagai cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau masyarakat setempat. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, pelaksanaan swakelola menyusun daftar kebutuhan, kegiatan, dan membentuk tim swakelola dengan ketentuan tersendiri dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas, yang diangkat oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. Pelaksanaan swakelola dilakukan oleh TPK (tim perencana kegiatan), tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

³³ Muhammad Fakhrur Rodzi, "Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Dan Desa* 3, No. 2 (2023): 151–163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelaksanaan Swakelola Desa

Secara teknis pelaksanaan kegiatan swakelola desa sebagai berikut:
³⁴

- 1) Kepala desa membentuk tim pelaksanaan yang beranggotakan kelompok masyarakat dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa.
- 2) Setelah terbentuk, tim pelaksana kegiatan membuat perencanaan kegiatan.
- 3) Setelah membuat perencanaan, tim pelaksana kegiatan melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksana kegiatan kepada kepala desa

Pelaksanaan swakelola dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya.
- 3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi: Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TP yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan , Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknik terkait, Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang atau mandor).

c. Perencanaan Swakelolah Desa

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- 1) K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) Pembentukan Tim Swakelola
- 3) Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- 4) Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
- 5) Rincian Biaya Pekerjaan
- 6) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
- 7) Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
- 8) Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
- 9) Rencana Swakelolah

³⁴ Prayoga Luthfil Hadi, Tilaka Wasanta, Dan Wimpy Santosa, "Pengaruh Indeks Infrastruktur Jalan Terhadap Indikator Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Hpji (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)* 7, No. 2 (2021): 143–152.

2.3. Definisi Konsep

Definisi konsep diartikan sebagai gambaran ide, gagasan ataupun fenomena-fenomena yang diamati secara konflek menjadi lebih sederhana. Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan konsep penelitian sehingga fokus pada objek penelitian yang diamati. Pada penelitian ini gambaran fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, yaitu belum meratanya pembangunan disebabkan oleh akses transportasi yang terbatas, khususnya akses jalan petani, sikap masyarakat yang acuh dan swakelola desa yang belum dipahami keseluruhan masyarakat. Selain itu beberapa fasilitas umum yang tersendat dan tidak merata juga turut menjadi fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri

Kajian penelitian ini berkenaan dengan pembangunan infrastuktur desa. Dalam penelitian ini menggunakan konsep pembangunan desa. Ada beberapa Definisi Operasional pada kajian ini, yaitu :

1. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
2. Swakelola diartikan sebagai pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan desa yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dan diterapkan melalui keputusan kepala Desa

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.³⁵

³⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," Alfabeta, Bandung (2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini terkait swakelolah pembangunan infrastruktur jalan tani desa yang diartikan sebagai keterlibatan pemerintah desa dibantu masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan tani yang dibagi menjadi 3 tahap diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Perangkat Desa di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri	1. Perencanaan	1. Jadwal pelaksanaan 2. Rencana pembangunan, tenaga kerja, bahan dan peralatan 3. Gambaran rencana kerja 4. Perkiraan biaya
	2. Pelaksanaan	1. Dilaksanakan berdasarkan perencanaan 2. Kebutuhan barang dan jasa 3. Tatacara pelaksanaan perencanaan awal
	3. Pemantauan dan Pengawasan	1. Pemantauan dilakukan oleh kepala desa dan staf 2. Pertanggungjawaban anggaran 3. Evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

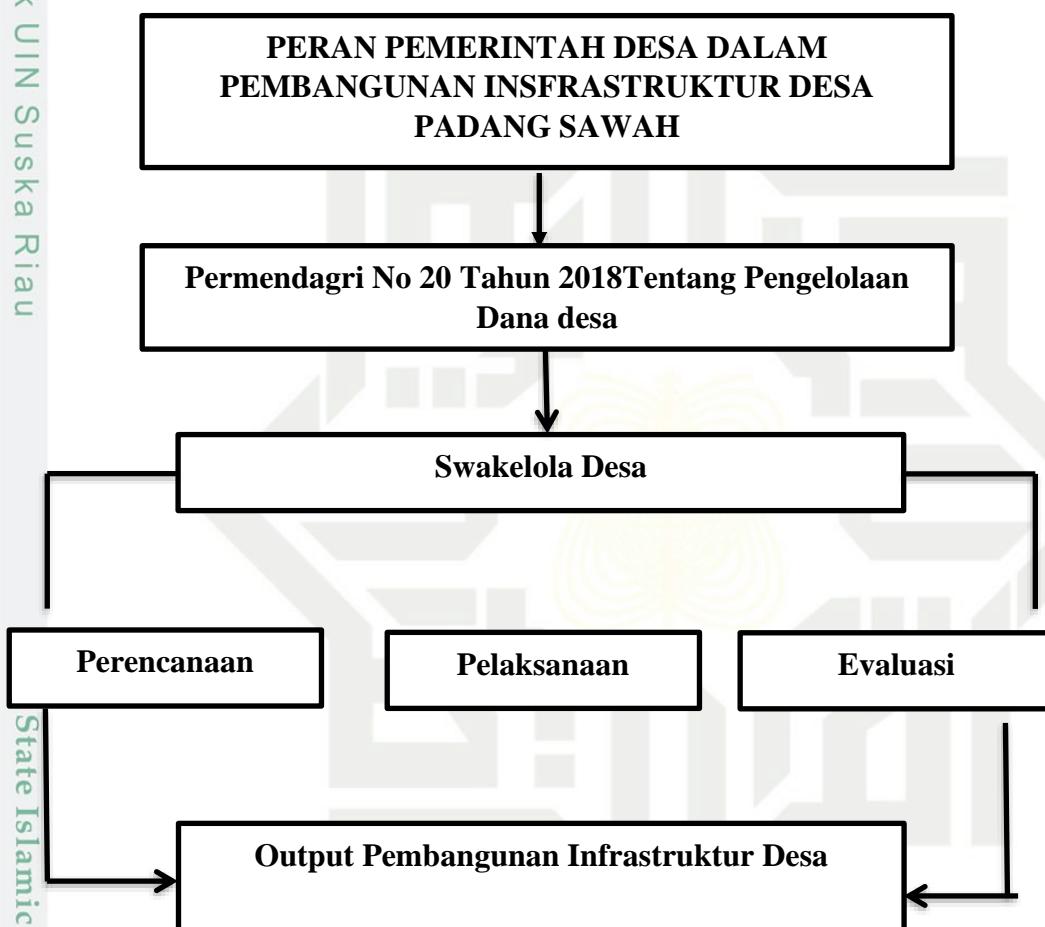
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.³⁶

Gambar 1

Kerangka Pikir



UIN SUSKA RIAU

³⁶ Muri Yusuf, "Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan," *Prenada Media*. Jakarta (2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif mengandung pengertian sebagai penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.³⁷ Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam keberhasilan penelitian dengan hasil penelitian menekankan pada makna dan penjabarannya.³⁸

Sementara Penelitian ini mengembangkan kenyataan, realita yang ada dilapangan dengan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena yang ada dalam penelitian, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan serta data informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel penelitian dan menjawab rumusan masalah. Menurut Sugiyono metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.³⁹

Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan terkait dengan keilmuan peneliti tentang pengembangan masyarakat yang salah satu fokusnya adalah pembangunan desa atau pembangunan sosial yang mana pada penelitian ini akan melihat swakelolah kebijakan infrastruktur dari pemerintah desa, serta peran pemerintah desa dalam pembangunan desa selain itu judul ini sesuai dengan fenomena yang ada di desa tempat penelitian akan dilakukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Pemilihan lokasi ini dikarenakan kemudahan dan juga sesuai dengan kemampuan penulis dalam mendapatkan data yang diinginkan untuk melakukan penelitian. Desa Padang Sawah juga dipilih karena kemudahan dalam memperoleh data penelitian selain itu lokasi penelitian memiliki relevansi dengan objek penelitian maksudnya disini desa tersebut memiliki program pembangunan desa sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pembangunan infrastruktur desa harapan jaya serta kendala yang dihadapi desa dalam melakukan pembangunan desa.

³⁷ Setyaningrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Umm Press, 2012).

³⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D."

³⁹ Wiwin Yuliani Dan Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

3.3 Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut meleong mendefinisikan subjek penelitian adalah informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi tempat penelitian, selain itu subjek juga diartikan sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian diantaranya, dari pihak desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan desa, kepala dusun dan masyarakat . Sehingga total instrumen adalah 5 orang

Sementara objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti. Sehingga mampu memecahkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah peran pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kmapar Kiri

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ilham Riko	Sekretaris Desa
2	Zulkifli A lubis	Kasi Pemerintahan
3	Agusti Idrus	Kepala Dusun
4	Daniar	Masyarakat
5	Yusril	Masyarakat

Sumber: *Data Olahan Peneliti*, 2025

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer atau *primary* atau *basic* adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti

Data Primer berisi hasil dari wawancara dan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti ini merupakan data yang diperoleh dari responden dengan mengajukan pertanyaan. Informan dalam penelitian ini adalah Perangkat Pemerintah Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber sekunder melalui media perantara, data sekunder biasanya dibuktikan dengan fakta. Karena sesuatu dan hal lain, peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukar memperoleh data dari sumber primer dan juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, dan tabel-tabel mengenai topik penelitian. Serta data sekunder ialah sebagai data penunjang kebutuhan peneliti terhadap obyek yang akan di teliti. Adapun data sekunder yang diperlukan meliputi :

- a. Dokumen data, dinas atau instansi terkait penelitian. Dalam penelitian ini data pembangunan infrastruktur didapatkan dari Pemerintah Desa.
- b. Buku, jurnal, yang data nya berbentuk relevan untuk di gunakan sebagai bahan literatur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan sesuaikan dengan kebutuhan analisis, agar penulisan ini dapat menjawab permasalahan yang akan di teliti, untuk kebutuhan analisis penulis perlu mengumpulkan data atau informasi yang di perlukan, maka peneliti akan menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang di maksud, adapun teknik yang di gunakan sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Wawancara (interview), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan dari narasumber. Dengan wawancara berhadapan muka antara pewawancara dengan responden dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dengan menggunakan indeep interview.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat data yang akurat dan nyata. Observasi yang digunakan data penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan atau observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur dimaksud dilakukan tanpa menggunakan *quide* observasi. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Pada kajian ini penulis mengamati perilaku informan dengan mengikuti aktivitas atau kegiatan mahasiswa aktivis di lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi. Terkhusus kepada informan laki-laki penulis mengikuti segala kegiatan mereka dimulai dari pagi sampai malam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dokumen, surat-surat, dan karya-karya monumental yang semua akan memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁰ Dokumentasi memiliki keunggulan yaitu sebagai alat validasi dan penguat data, terutama data data yang tidak bisa dijelaskan secara deskriptif maupun kata-kata. Dokumentasi dalam penelitian ini diantaranya berupa catatan yang berisikan semua data tentang pembangunan infrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Kualitatif deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fenomena yang ditemukan di lapangan. Setelah semua data primer dapat dikumpulkan dari responden, kemudian data tersebut dipisahkan berdasarkan kategori yang di tentukan dan disusun baik. Lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara.

Terdapat empat model interaktif dalam analisis data, yaitu pengumpulan data reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁴¹

1. Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategi kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis.

2. Reduksi Data

Data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data adalah data yang berupa catatan lapangan (*filed notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2021).

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang di pandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru hal tersebut yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi

3. Penyajian Data

Penyajian Data dilakukan dengan cara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Penggunaan display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, teks naratif merupakan jenis yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

vnb

3.7 Teknik Validitas Data

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data yang dikumpulkan selama riset. Untuk riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun kelapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis – interpretatif data. Teknik validitas data penelitian menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di cross-check dengan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
dokumen yang ada.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2010"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis

Desa Padang Sawah ini merupakan Desa yang telah ada sejak lama di bawah pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri dan di pinggir sungai Subayang juga dapat merupakan sarana transportasi menuju desa tetangga, meskipun sudah memiliki jalan darat, disamping merupakan sumber perairan umum yang dapat dikembangkan budi daya ikan dalam kerambah, lubuk larangan ikan maupun panangkapan (eksploitasi). Terbentuknya desa Padang Sawah merupakan bukti komitmen pemerintah daerah kabupaten kampar dalam rangka semangat otonomi daerah, dimana desa padang sawah ini merupakan hasil pemekaran dari desa Kuntu yang mana dilatar belakangi beberapa aspek, antara lain : Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dan

Pembentukan desa Padang Sawah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pembinaan kemasyarakatan

Luas Desa Padang Sawah lebih kurang 25 KM2, adapun jarak Desa Padang Sawah ini dari pusat ibukota Kecamatan Kampar Kiri lebih kurang 19 KM. Desa Padang Sawah mempunyai 4 Dusun yaitu, yang berdiri dari 8 RW 16 RT. Sedangkan mengenai batas wilayah Desa Padang Sawah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Raja/Tanjung Mas 2
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Liti
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuntu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Domo

Sedangkan mengenai iklim Desa Padang Sawah tidak jauh berbeda dengan lainnya yaitu dengan iklim tropis dengan suhu rata-rata harian 28 C⁴³

4.2. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Oleh karena itulah maka proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam

⁴³ Pemerintah Desa Padang Sawah. 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ménentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data statistik tahun 2024 jumlah penduduk Desa Padang Sawah sampai saat sekarang ini berjumlah 1.204 jiwa dengan 316 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Padang Sawah dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Padang Sawah

No	Indikator	Jumlah
1	Laki-Laki	702 Orang
2	Perempuan	592 Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	316 KK
4	Total Penduduk	1.204 orang

(Desa Padang Sawah :2024)

4.3. Topologi Desa

Tabel 4.2
Topologi Desa Padang Sawah

No	Bentangan Wilayah	Luas (Ha)
	Desa/ Kelurahan Dataran Rendah	1500
	Desa/ Kelurahan berbukit-bukit	4000
	Desa/ Kelurahan pengunungan	-
	Desa/ Kelurahan Tepian Sungai Pesisie	-
	Desa/ Kelurahan Kawasan Rawa	100
	Desa/ Kelurahan Aliran Sungai	3000
	Desa/ Kelurahan Bentagan Sungai	1000

(Desa Padang Sawah :2024)

4.4. Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu masyarakat, artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pula kemajuan yang dapat dipemukiman tersebut. Dan semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah juga kemajuannya. Sehingga jika suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang secara baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM) harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Dalam suatu masyarakat tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendidikan yang memiliki sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan, dengan tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Padang Sawah dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Pendidikan Penduduk Desa Padang Sawah

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
0-2 Tahun	7	6
3-6 Tahun Belum Masuk TK	41	39
Usia 3-6 Tahun Yang sedang TK	1	4
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	6	3
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	107	88
18 -56 tahun yang tidak pernah sekolah	15	19
18 -56 tahun yang tidak tamat SD	0	1
18 -56 tahun yang Tidak tamat SLTP	0	0
18 -56 tahun yang tidak tamat SLTA	0	0
Tamat SD/Sederat	131	131
Tamat SMP/ Sederajat	62	62
Tamat SMA/Sederajat	91	60
Tamat D3/Sederajat	4	10
Tamat S1/Sederahat	38	52
Tamat S2/ Sederajat		1
Lainnya	3	5
Pesantren	6	3
Usia 56 tahun ke atas yang tidak tamat sekolah	13	19
Jumlah	491	462

(Desa Padang Sawah :2024)

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Padang Sawah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	MDA	2
3	TK	1

(Desa Padang Sawah :2024)

4.5. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Padang Sawah ada yang golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, dan jasa.

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Masyarakat Padang Sawah

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri	1	1
2	Perajin Industri Rumah Tangga	0	0
3	Pedagang	10	4
4	Peternak	1	0
5	Belum/ TidakBekerja	87	259
6	Pensiun	20	9
7	Petani	52	8
8	Buruh Tani	119	17
9	Bersekolah	105	93
10	Belum sekolah	49	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Perangkat Desa	7	1
12	Nelayan	2	0
13	Guru	0	3

(Desa Padang Sawah :2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah desa memiliki peran aktif dalam pembangunan infrastruktur, yang mencakup tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini dilakukan melalui sistem swakelola dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, mediator, dinamisator dan regulator.
2. Jenis-jenis infrastruktur yang telah berhasil dibangun antara tahun 2022 hingga 2025 meliputi pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, box culvert, sumur bor, serta renovasi pasar desa. Ini menunjukkan adanya realisasi penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan fisik yang strategis.
3. Pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya optimal, di mana tidak seluruh alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagian dana masih digunakan untuk kebutuhan lain seperti pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

6.2. Saran

Berikut adalah **saran** yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi "*Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri*":

1. Pemerintah Desa perlu meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga, terutama akses jalan tani yang masih belum memadai.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa harus diperkuat, agar alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur lebih jelas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kesenjangan fasilitas publik yang masih ada di desa.
3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan tim pelaksana kegiatan perlu dilaksanakan secara berkala. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep swakelola, prosedur teknis, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan.
4. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalin sinergi yang lebih baik dengan instansi terkait, seperti dinas pekerjaan umum atau pendamping

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- desa, agar pembangunan infrastruktur mendapatkan bimbingan teknis dan pengawasan yang memadai.
5. Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa perlu ditumbuhkan, baik melalui edukasi maupun pemberdayaan langsung. Hal ini untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil pembangunan.
 6. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap pembangunan yang sudah dilakukan, agar pemerintah desa dapat memperbaiki kekurangan, menyusun perencanaan berikutnya dengan lebih tepat, dan menghindari pemborosan atau tumpang tindih program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif.dkk (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani. *Journal Ilmiah Administrativei*, 8(1), 104-116
- Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *Reformasi*, 5(1), 13–30.
- Atokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Palembang. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1652–1659.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 8(1), 43–46.
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Dewi Sarah Simbolon, Julia Sari, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 2 (2021): 104–116.
- Fauzia, F., Virantika, A., & Firmansyah, G. (2021). Langkah Langkah Strategis Pemenuhan Kebutuhan SDM Talenta Digital Di Lingkungan Pemerintahan Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KONIK)*, 39–46.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203–211.
- Hadi, P. L., Wasanta, T., & Santosa, W. (2021). Pengaruh Indeks Infrastruktur Jalan Terhadap Indikator Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 7(2), 143–152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 7091–7100.
- Malhayanti, Fitriani, & Winalti. (2021). *Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Media Utama.
- Nawawi, I., & Abdurrahman, A. (2009). *Pembangunan Dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori Dari Aspek Ekonomi, Dan Sosiologi*. Putra Media Nusantara (PMN).
- Nurman, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keaktifan Kader Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga Di Desa Tanjung Medang Wilayah Kerja Puskesmas Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2017. *Jurnal*, 1(1), 2194–2580.
- Raharjo, A. (2013). Pembangunan Pedesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Insfrauktur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 19(3), 689–701.
- Rivai, V. (2003). *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Riyadi, B., & Supriady, D. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Rochajat. (2011). *Komunikasi Pembangunan Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151–163.
- Rumawas, V. V, Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1).
- Rusnan, R., Sarkawi, S., & Koynja, J. J. (2023). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Diskresi*, 2(2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sastropoetro, A. S. (1986). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. In *Jakarta: Get Press Indonesia*.
- Setyaningrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Siagian, P. S. (2001). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Simbolon, B. S. P. (2022). *Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir)*.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT Kita*, 7(1), 71–82.
- Soekanto. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(1), 104–116.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. *Alfabeta*, Bandung.
- Tjokroamidjojo, B. (2006). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wirabrata, A., & Surya, T. A. (2011). Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 729–752.
- Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina.
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20.
- Yusuf, M. (2017). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Prenada Media. Jakarta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1

Wawancara Informan 3



Gambar 2

Wawancara Informan 1 dan aparatur desa lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 3****Pengumpulan profil Dan Data Pembangunan****Gambar 4****Pembuatan Sumur Bor**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5

Perbaikan jalan menuju perkebunan warga



Gambar 6

pembuatan Jembatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR DESA PADANG SAWAH

Indikator Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan

1. Apakah sebelum melakukan pembangunan pemerintah desa melakukan musyawarah desa bersama masyarakat?
2. Apakah dalam perumusan program pembangunan pemerintah desa melibatkan masyarakat?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam merekrut pekerja dalam pembangunan desa padang sawah?
4. Berapa tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan di Desa Padang Sawah?
5. Apakah tenaga kerja, yang digunakan berasal dari dalam masyarakat Desa Padang Sawah sendiri atau diluar desa, alasan?
6. Apakah alat dan bahan untuk pembangunan disediakan oleh desa atau bergotoroyong bersama masyarakat?
7. Apa saja program yang direncanakan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2022-2025?
8. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa padang sawah dalam jangka waktu 2022-2025?
9. Bagaimana sumber dana dalam pembangunan desa padang sawah?
10. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyusun jadwal perencanaan pembangunan desa padang sawah?
11. Apakah pembangunan desa sesuai dengan hasil kesepakatan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), apa peran pemerintah desa dan masyarakat dalam hal ini?
12. Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa? Jelaskan kendalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator Pelaksanaan

1. Berapa jenis pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan desa padang sawah setiap tahunnya?
2. Apakah pembangunan dilakukan secara bertahap?
3. Bagaimana tahap pembangunan desa?
4. Siapakah pihak terlibat dalam pembangunan desa? Bagaimana peran mereka?
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa padang sawah?
6. Apakah pembangunan berdasarkan pada perencanaan awal?
7. Apa alasan pemerintah desa memilih program pembangunan tersebut?
8. Jika pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal , apa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
9. Apakah ada alternatif lain yang dilakukan pemerintah desa jika pembangunan desa jika perencanaan awal tidak terlaksana
10. Rincikan pembangunan desa di desa Padang Sawah pada tahun anggaran 2022-2024
11. Apakah pembangunan yang dilakukan sudah menyeluruh dalam segala aspek yang dibutuhkan?
12. Apa yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Padang Sawah? Jelaskan
13. Bagaimana peran pemerintah desa dalam tata pelaksanaan pembangunan desa Padang Sawah??
14. Apakah pelaksanaan pembangunan desa padang sawah selalu berjalan lancar?
15. Apakah ada alternatif kedua dalam pembangunan desa apabila alternatif pertama tidak tercapai? jelaskan
16. Apa yang menjadi kendala dalam proses pembangunan di desa Padang Sawah?
17. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator Pemantauan dan Pengawasan

1. Apakah pemerintah desa berperan dalam melakukan pengawasan pembangunan desa di desa Padang Sawah?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam proses pemantauan dan pengawasan pembangunan desa padang sawah?
3. kapan proses pengawasan pembangunan dilakukan?
4. bagaimana cara pemerintah desa padang sawah dalam mempertanggungjawabkan pembangunan di desa padang sawah?
5. Siapa yang melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pembangunan di Desa Padang Sawah?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pembangunan desa?
7. Berapa persen keberhasilan pembangunan desa padang sawah dari perencanaan awal?
8. Apakah pembangunan yang dilakukan di Desa Padang Sawah dapat menjadi solusi dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam bidang insfrastruktur?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam pembangunan yang dilakukan di desa padang sawah?
10. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan yang sudah dilakukan?
11. Bagaimana peran pemerintah desa dalam proses evaluasi pembangunan desa di desa padang sawah?
12. Bagaimana harapan dari masyarakat desa untuk pembangunan desa pada periode mendatang?
13. Bagaimana harapan dari pemerintah desa untuk pembangunan desa pada periode berikutnya?